PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I WAYAN WIDIANA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **738312**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.202.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/375 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
4. Tanah Seluas 445 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 370.800.000**

1. MOTOR, SEPEDA MOTOR HONDA VARIO MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2009, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.800.000
3. MOBIL, SUZUKI FORSA ANEMITY SF 413/5 KENDARAAN RODA 4 Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOBIL, NEW EXPANDER ULTIMATE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 70.000.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	1.600.000.000
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	195.000.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	5.437.800.000
III.	HUTANG	Rp.	240.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.197.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.